Efek pandemi COVID-19 baik secara nasional maupun lokal telah memberikan pukulan keras terhadap perekonomian Kabupaten Tegal baik terhadap keuangan daerah (APBD) maupun prekonomian masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan keuangan daerah, diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 menurun paling sedikit 8%. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya pengurangan penerimaan daerah dari dana transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) yang dipotong ± 9,5%. Padahal dana perimbangan saat ini berkontribusi ± 55% dari total pendapatan daerah yang ada.

Gambar 2
Perbandingan Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Tegal Tahun 2020

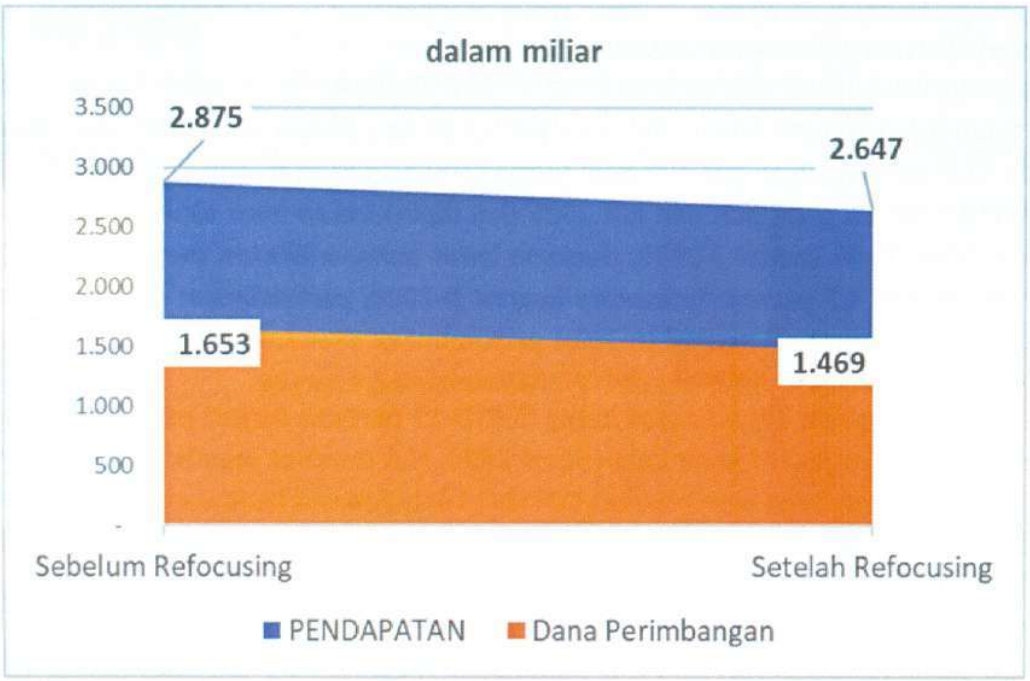

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 (diolah)

Kondisi tersebut semakin memperparah dan menekan ruang fiskal daerah Kabupaten Tegal dalam rangka penanganan COVID-19 . Setidaknya sudah dilakukan beberapa kali *refocusing* anggaran belanja Perangkat Daerah yang akan dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk penanganan COVID-19 . Hingga saat tulisan ini dibuat, setidaknya sudah terkumpul hasil *refocusing* anggaran yang nominalnya mencapai Rp. 156,955 miliar. Anggaran BTT tersebut ditujukan untuk penanganan COVID-19 dalam hal kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi yang setidaknya untuk 3 (tiga) bulan (April-juni). Jika kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, pemerintah daerah terancam kehabisan anggaran untuk penanganan COVID-19 selanjutnya.

Gambar 3
Perubahan Belaja Tidak Terduga
Kabupaten Tegal Tahun 2020

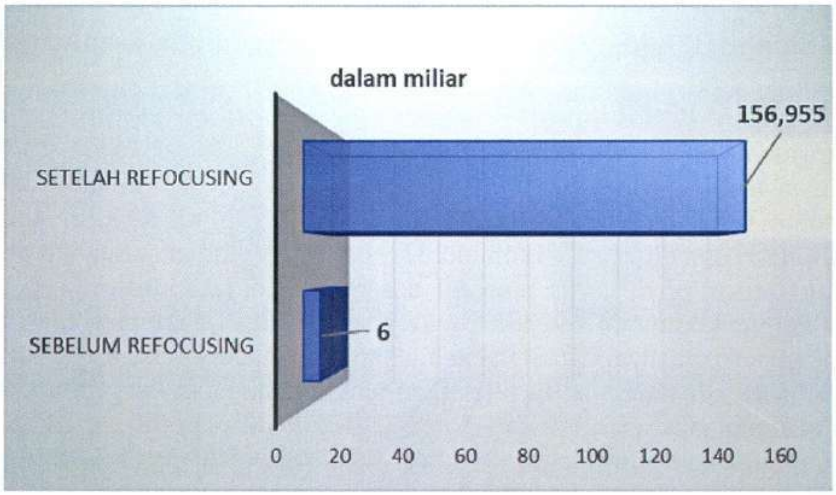

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 (diolah)

Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Hal tersebut memaksa perusahaan dari yang skala besar hingga kecil merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Setidaknya dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir sudah ada ribuan karyawan asal Kabupaten Tegal dari berbagai skala industri yang di- PHK namun tidak dilaporkan. Pada sektor informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%.

Ada beberapa hal yang dirasa bisa lebih mempanjang kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi secara tepat. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, budaya dan religi.

Merujuk fakta kondisi di Kabupaten Tegal saat ini, protokol kesehatan dalam berbagai aktifitas masyarakat kurang dipedomani, jalanan masih padat, kerumunan masih banyak dijumpai, pergerakan manusia dari dan ke zona merah cukup *massive* bahkan tidak terpantau dan sulit bisa dicegah. Sementara jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut maka pandemi COVID-19 akan semakin lama berlangsung, akibatnya resesi ekonomi (skala mikro) masih akan berlangsung. Sektor-sektor ekonomi besar-kecil semakin lama akan semakin lumpuh. Akan lebih banyak lagi tambahan karyawan di-PHK bahkan perusahaan gulung tikar. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah dari sisi kesehatan belum bisa diukur dengan jelas. Untuk itu kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menangani pandemik ini sangat menentukan kecepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca krisis.

Beberapa kondisi dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, masih sangat memungkinkan bahwa ditahun 2021 wabah COVID-19 masih eksis dan berpotensi merusak perekonomian secara fundamental di Kabupaten Tegal. Untuk itu setidaknya ada beberapa isu strategis COVID-19 Kabupaten Tegal yang harus dirumuskan kebijakannya saat ini, antara lain:

a. Penanganan Lanjutan COVID-19

Dengan melihat kondisi saat ini, jika penanganan COVID-19 baik dalam lingkup nasional maupun lokal (Kabupaten Tegal) tahun 2020 tidak solutif, maka dampak COVID-19 masih akan dialami dan dirasakan ditahun 2021. Berbagai pembelajaran dan permasalahan yang dihadapi sebelumnya harus menjadi dasar dan penyempurnaan kebijakan dalam penanganan lanjutan. Minimal kebijakan sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat perlu disempurnakan efektiftasnya. Dalam hal kebijakan sektor kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis perlu dikuatkan baik kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan pada sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Tegal, kebijakan perlu diarahkan pada sistem stimulus ekonomi yang produktif.

Hakikatnya masih banyak kebijakan-kebijakan penanganan lanjutan lainnya yang perlu dirumuskan dan disempurnakan. Sebagai langkah antisipasi ditahun 2021, maka penanganan COVID-19 tahun 2020 perlu dievaluasi secara periodik dan menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan penganganan COVID-19 yang lebih efektif dan efisien dimasa mendatang.

b. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca COVID-19

Pemulihan sosial ekonomi pasca COVID-19 sangat tergantung pada kecepatan dan ketepatan penanganannya saat ini. Semakin lama proses penanganannya maka semakin lama pula proses pemulihannya. Hal tersebut terkait dengan seberapa parah kerusakan pada struktur sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Seperti yang telah disampaikan banyak pakar khususnya pakar ekonomi di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menghempaskan dunia usaha dan memunculkan PHK masal secara nasional. Akibatnya, akan ada potensi ribuan kasus pengangguran dan kemiskinan baru di Kabupaten Tegal. Kondisi ini menjadi pukulan telak kedua setelah wabah COVID-19 itu sendiri. Dalam kondisi segala sumberdaya telah dikerahkan untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tegal juga harus menyiapkan sumberdaya yang mumpuni untuk menangani dampak pasca COVID-19 khususnya pada isu kemiskinan dan pengangguran.

Sebenarnya profil kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 secara umum mempunyai tren cukup positif jika dibandingkan tahun 2018. Persentase penduduk miskin turun 0,30 poin menjadi 7,64% (109,94 ribu jiwa), indeks kedalaman kemiskinan turun 0,77 poin menjadi 0,64 dan indeks keparahan kemiskinan turun 0,35 poin menjadi 0,09. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun yang sama sejumlah 57.742 orang atau 8,21%. Namun dengan adanya wabah Covid-19 ditahun 2020 akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kab. Tegal. Jika merujuk pada asumsi nasional berdasarkan skenario berat ekonomi dimana kemiskinan nasional akan naik 0,45 poin menjadi 9,59% sedangkan angka pengangguran meningkat 5,28 poin menjadi 10,56%. Dengan asumsi proporsi peningkatan yang sama maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal diperkirakan bisa mencapai 8,09% dan angka pengangguran menjadi 13,49%. Asumsi ini belum memasukan variabel ketidakpastian dimana kita belum bisa memastikan kapan wabah bisa berakhir. Semakin lama wabah berlangsung, maka potensi kemiskinan dan pengangguran akan semakin tinggi.

Gambar 4
Prediksi Kenaikan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Akibat COVID-19 di Kabupaten Tegal

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan dua isu utama dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca COVID-19 di Kabupaten Tegal, kebijakan-kebijakan yang INOVATIF harus menjadi salah satu *guideline* program/kegiatan Perangkat Dearah tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Berbagai kebijakan khususnya terkait jaring pengaman sosial untuk warga miskin, stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil, penyediaan lapangan kerja harus tergambar dalam program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah, khususnya Dinsos, Dinakerin, dan Disdagkop. Untuk itu inovasi kebijakan strategis yang efektif dan efisien ditahun 2021 harus segera diformulasikan.

c. Transformasi ekonomi wilayah potensial

Pandemi COVID-19 telah merusak struktur ekonomi secara luas. Rantai-rantai perekonomian-pun secara umum telah rusak. Belajar dari realita yang ada, proses transformasi ekonomi wilayah perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa potensi transformasi ekonomi yang perlu dipertimbangkan dan dikembangkan di Kabupaten Tegal antara lain:

- Digitalisasi ekonomi wilayah mulai skala kecil hingga besar. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi COVID-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat disemua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-*manage* dan dikembangkan keterkaiatan hulu hilirnya (*supply chain management*). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan. Jika merujuk istilah saat ini boleh kita sebut sebagai pertanian 4.0, perdagangan 4.0, dan industri pengolahan 4.0;
- Rusaknya struktur ekonomi secara luas berpotensi semua pelaku usaha bisa mengambil peran pelaku usaha lainnya. Siapa yang *survive*, yang paling cepat pulih dan INOVATIF akan bisa merebut *market share* sebanyak-banyaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; raparasi mobil dan sepeda motor).

Gambar 5
Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi
Kabupaten Tegal Tahun 2019

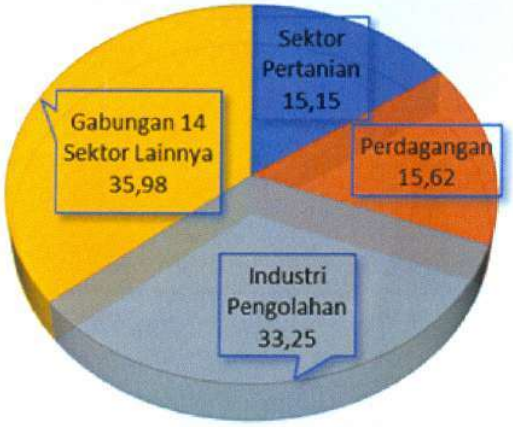

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2020 (diolah)

Dalam hal industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi COVID-19 saat ini banyak sektor industri pengolahan yang gulung tikar akibat tidak mampu beradaptasi. Ini bisa menjadi peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal jika mampu *survive dan INOVATIF*. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manukfaktur mengalami penurunan yang tajam. Maka dari itu pemerintah daerah bagaimana caranya harus mampu menyelamatkan eksistensi industri pengolahan yang ada untuk saat ini. Bersamaan dengan itu industri manukfaktur harus diarahkan agar bisa melihat peluang produk industri manufaktur apa yang tingkat permintaannya tetap tinggi bahkan meningkat ditengah wabah COVID-19 ini. Dengan melihat peluang tersebut maka pelaku usaha lokal perlu dibantu dan difasilitasi agar bisa menghasilkan produk yang lebih terdiversifikasi sesuai permintaan pasar (berorientasi ekspor), khususnya yang ada keterkaitan *(interlinkage)* dengan sektor primer lokal.

Industri pengolahan lokal harus mampu menciptakan nilai tambah *(value added creation)* produk-produk sektor primer lokal sekaligus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang ditinggalkan oleh industri ditempat lain. Atau minimal untuk saat ini peran sektor industri lokal yang ada tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Untuk sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi COVID-19, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kab. Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan. Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian

modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran akibat wabah COVID-19 khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir;

- Perlu dilakukan suatu inovasi dan inkubasi suatu usaha ekonomi yang potensi permintaan pasarnya besar akibat pandemi COVID-19 namun *supply*-nya masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar yang tepat. Misalnya, adanya potensi industri kesehatan. Tidak cukup hanya menjelaskan bisnis kesehatan saja, tetapi harus lebih fokus jenis bisnis dan pasarnya, misalkan APD, handsanitizer, siapa pasarnya, bagaimana persaingannya, seberapa besar peluangnya dan dimana pasarnya.

d. Perspektif *New Normal*

Masih berkembangnya kasus Covid-19 di Indonesia memaksa pemerintah mencari solusi agar perekonomian bisa tetap hidup ditengah pandemi Covid-19. Beberapa alternatif mulai dilirik salah satunya konsep *new normal*. Konsep *new normal* pada dasarnya bertujuan agar masyarakat bisa berakitifitas sebagaimana mestinya ditengah pandemi Covid-19. Dalam kehidupan *new normal*, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru dan konsisten menerapkan protokol pencegahan penularan virus disetiap aktifitasnya.

Meskipun dibanyak negara termasuk di Indonesia konsep new normal tidak mampu menjamin perekonomian pulih kembali, namun opsi *new normal* layak dipertimbangkan. Untuk dapat menerapkan konsep *new normal* ini ada beberapa ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh WHO antara lain:

- Mampu mengendalikan transmisi Covid-19;
- Mempunyai sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni khususnya rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak dan mengakarantina pasien Covid-19;
- Mampu meminimalisir risiko penularan wabah terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi, seperti di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian;
- Mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan di tempat kerja, seperti *physical distancing*, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk dan bersin, dan protokol pencegahan lainnya;
- Mampu memantau dan mencegah risiko penularan impor dari wilayah lain dengan ketat;
- Melibatkan masyarakat untuk memberi masukan, berpendapat, dalam proses masa transisi the *new normal*.

Dengan melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal yang relatif datar, memungkinkan konsep *new normal* segera diterapkan di Kab. Tegal. Adapun beberapa hal penting yang perlu disiapkan antara lain:

- Menyiapkan masyarakat menuju kehidupan new normal melalui, sosialiasi, diseminasi dan edukasi aktif. Dalam hal ini keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa sangat penting;
- Menyiapkan sistem kesehatan yang mumpuni khususnya dalam tahap identifikasi dan pengujian spesimen. Untuk itu jumlah *test toolkit* Covid-19 dan kemampuan melakukan test (*surveillace*) harus cukup dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- Menyiapkan sistem Pendidikan (fomal dan informal) yang efektif dalam periode *new normal* khususnya dalam proses belajar mengajar;
- Menyiapkan kebijakan dan standar aturan *new normal* yang didalamnya memuat protokol kesehatan pada semua lini kehidupan masyarakat khususnya pada aktifitas ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan masyarakat;
- Menyiapkan sistem dan standar kerja bagi ASN, pekerja formal dan informal;
- Menyiapkan panduan masyarakat dana memasuki fase *new normal*;
- Membentuk Tim Transisi fase *new normal*;

Sebenarnya konsep new normal masih menjadi pro kontra bagi kalangan para ahli. Bagi kelompok yang setuju tentu saja motif ekonomi menjadi alasannya. Namun bagi kelompok yang menolak berpandangan bahwa konsep *new normal* yang digambarkan secara umum saat ini sangat berisiko jika diterapkan di Indonesia. Alasannya infrastuktur kesehatan dirasa belum siap dan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih sangat rendah.

Untuk di Kabupaten Tegal, formulasi konsep new normal seperti apa yang cocok tentu saja perlu dikaji lebih dalam. Namun untuk bisa dihasilkan formulasi yang tepat, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1) Dalam masa pengetatan saat ini, perilaku sebagian masyarakat tetap acuh akan protokol kesehatan. Apalagi jika pengetaan dilongggarakan, maka protokol kesehatan semakin ditinggalkan. Hal ini tentu berisiko besar terhadap kesiapan fasilitas kesehatan di Kab. Tegal dalam menampung potensi ledakan kasus Covid-19;
2) Konsep *new normal* konvensional dirasa tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat terutama yang telah teredukasi protokol kesehatan Covid-19 akan tetap berperilaku sebagaimana saat masa pengetatan. Golongan tersebut akan lebih memilih aman dan menghindari kerumunan dan kontak fisik langsung sampai benar-benar yakin Covid-19 tidak lagi menjadi ancaman. Artinya bentuk aktifitas jual-beli tidak akan berubah banyak dan geliat ekonomi kemungkinan akan tetap landai;
3) Dalam kondisi pengetatan saat ini, aktifitas ekonomi masyarakat di Kab. Tegal mulai terdigitalisasi. Hal ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat mulai beradaptasi

mandiri dengan kondisi pengetatan yang ada. Dengan diterapkannya *new normal* yang asal-asalan justru berpotensi merusak proses alamiah adaptasi masyarakat dalam bertransformasi ekonomi secara digital;

4) Konsep *new normal* harus dimaknai dalam dua bentuk/sifat yaitu konsep yang sementara dan konsep yang bisa dipakai secara berkelanjutan. Suatu konsep yang sifatnya sementara adalah konsep new normal yang bisa dipakai setidaknya hingga vaksin ditemukan. Sifat konsep yang sementara ini jangan sampai menghabiskan banyak sumberdaya bahkan menaruh resiko yang cukup besar. Apalagi mengingat banyak jenis temuan vaksin yang sedang melakukan uji klinis (fase 3) pada manusia. Sebagai contoh pada sektor pendidikan, jika transmisi lokal masih terjadi meskipun sekecil apapun, konsep new normal pendidikan jangan dipaksakan dengan metode tatap muka secara langsung. Lebih bagus diformulasikan dan dikembangkan metode pendidikan daring yang sudah ada saat ini agar lebih efektif dan efisien, setidaknya hingga vaksin siap diedarkan. Sedangkan untuk konsep new normal yang sifatnya berkelanjutan harus mampu memproyeksikan kebutuhan masa depan.

POLICY BRIEF (KEBIJAKAN RINGKAS) PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 DI KABUPATEN TEGAL TERHADAP DAMPAK KESEHATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Virus 2019-nCoV atau Covid-19 (istilah terbaru) – novel coronavirus – yang berasal dari Wuhan, China telah menjadi isu kesehatan global. Kasus Covid 19 di Kabupaten Tegal untuk pelaporan s/d tanggal 1 Mei 2020 yang positif Covid 19 sebanyak 13 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 131 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 948 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 164 orang dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 35.237 orang. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

REKOMENDASI

a) Putuskan rantai infeksi/transmisi Covid 19 yaitu dengan cara cegah (prevent), skrinning (detect), tangani kasus dan determinan (response), social & physical distancing, protect health workers melalui kegiatan Penyemprotan desinfektan, penyedian hand sanitizer di tempat umum, pembagian masker dll dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19
b) Melakukan pengujian sampel yang masif terhadap pasien Covid 19 dengan melakukan kegiatan menyusun rencana aksi untuk 2 sd 3 bulan kedepan mulai Penyediaan APD, ALKES, BHP, obat-obatan dan keperluan kesehatan lainnya dalam rangka penyembuhan pasien Covid 19
c) Pelacakan yang agresif dengan kegiatan melakukan tracking/skrinning dan pengujian rapid test terhadap pelaku perjalanan (PP), orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pengawasan (ODP)
d) Melakukan isolasi dan karantina yang ketat dengan menyewa ruang isolasi rumah sakit swasta (RS Harapan Sehat dan RS Hawari Essa), penyediaan tempat karantina komunal di GOR Indoor Trisanja, WKJ Kalibakung, Sewa hotel dll.
e) Melakukan analisa sebaran kasus Covid 19 di Kabupaten Tegal untuk mengetahui kewilayahan epidemiolgi Covid 19 dan kewilayahan wabah Covid 19.

1. PENDAHULUAN

Virus 2019-nCoV atau Covid-19 (istilah terbaru) – novel coronavirus – yang berasal dari Wuhan, China telah menjadi isu kesehatan global. Virus ini sebagaimana dilaporkan berbagai sumber telah mewabah sejak awal Januari 2020 lalu. Berawal dari laporan kasus radang paru-paru (pneumonia) yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019 lalu. Pneumonia sendiri kondisi inflamasi di alveolus paru-paru, bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, dengan gejala khas, batuk, demam, nyeri dada dan sulit bernapas. Pemeriksaan penunjang bisa dengan rontgen dan pemeriksaan sputum atau dahak.

Dari situ akan di ketahui bakteri atau virus yg menginfeksi. Dalam kasus Wuhan, China, Virus Covid-19 kemudian dikonfirmasi sebagai penyebab penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian tersebut.

Pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization (WHO), corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (Sindrom Pernafasan Timur Tengah – MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (Sindrom Pernafasan Akut Parah – SARS-CoV). Coronavirus novel (Covid-19) adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Peneliti dari Amerika dan Inggris, Jonathan M. Read dkk. (2020) menyebutkan R0 (rasio reproduksi dasar) Covid-19 adalah diantara 3.6 dan 4.0. Artinya, satu orang terkena Covid-19 berpotensi menularkan virus tersebut setidaknya ke empat orang lainnya.

Kasus Covid 19 di Kabupaten Tegal pada awal pelaporan tanggal 19 Pebruari s/d 18 Maret terdapat Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 1 orang dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 2 orang pada bulan Pebruari 2020. Pada tanggal 1 s/d 18 Maret Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 5 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 36 orang, dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 101 orang.

Sedangkan untuk pelaporan s/d tanggal 1 Mei 2020 yang positif Covid 19 sebanyak 13 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 131 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 948 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 164 orang dan Pelaku Perjalanan (PP) sebanyak 35.237 orang.

Grafik perkembangan kasus Covid 19 baik jumlah Positif Covid 19, PDP, ODP, OTG dan PP di Kabupaten Tegal pada bulan Pebruari s/d 12 April 2020 :

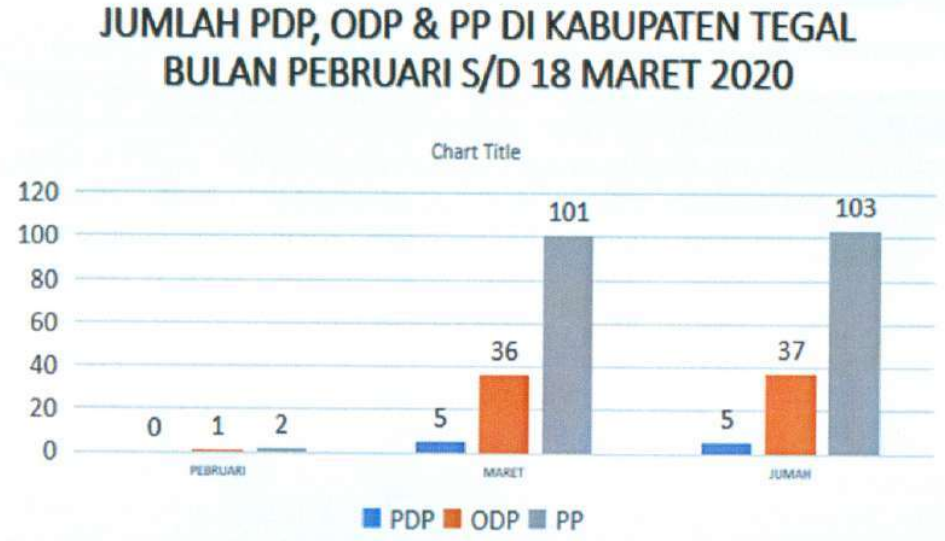

PETA SEBARAN ODP, PDP DAN POSITIF COVID 19 DI KAB. TEGAL PER TANGGAL 1 MEI 2020

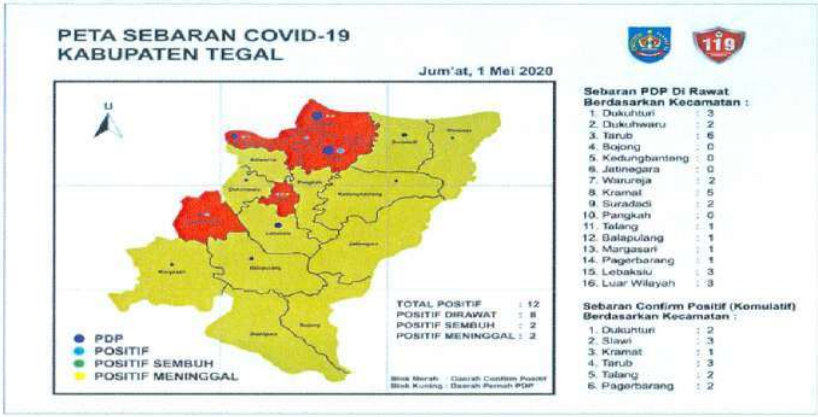

TREN ODP, PDP DAN POSITIF COVID 19 DI KAB. TEGAL PER TANGGAL 1 MEI 2020

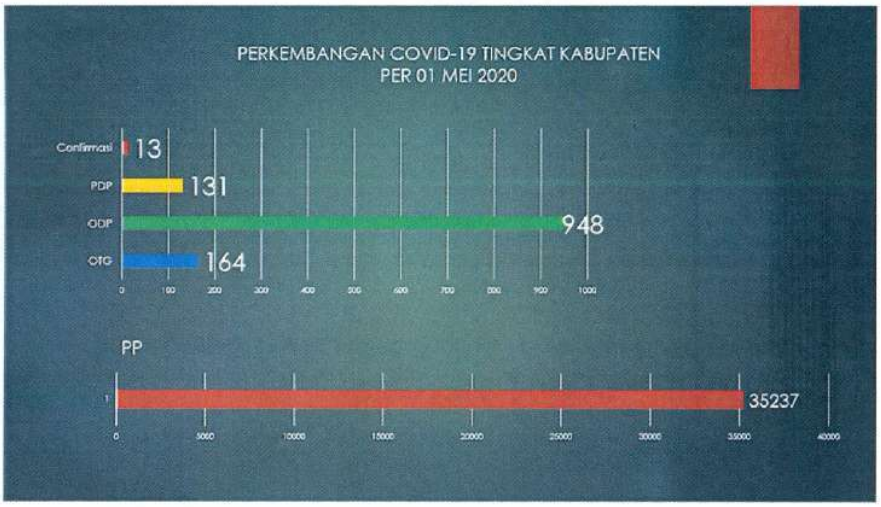

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada saat ini gejala Covid-19 dapat muncul dalam 2 hari atau selama 14 setelah seseorang terpapar dengan virus tersebut. Hal ini berdasarkan asumsi masa inkubasi kasus virus MERS-CoV (CDC, 2020). Seseorang terkena infeksi Covid-19 yang telah dikonfirmasi baru-baru ini, akan mengalami gejala ringan hingga sakit parah, bahkan sampai kematian (CDC, 2020). Gejala awal Covid-19 termasuk demam, batuk dan sesak nafas (CDC, 2020). CDC menjelaskan penyebaran Covid-19 dari orang ke orang terjadi melalui kontak dekat (sekitar 2 meter). Menurut CDC, penyebaran orang ke orang diperkirakan terjadi melalui cipratan pernapasan yang terjadi ketika orang yang terinfeksi Covid-19 batuk atau bersin. Penularan ini mirip dengan penularan influenza dan patogen (mikroorganisme parasit) pernapasan lainnya. Cipratan dari bersin atau batuk ini kemudian mendarat di mulut atau hidung orang yang berada di dekatnya, lalu mungkin terhirup ke dalam paru-paru orang sekelilingnya (CDC, 2020). Selain itu, penularan Covid-19 dimana seseorang menyentuh permukaan atau benda yang di atasnya terdapat Covid-19, kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau matanya, dalam hal ini, belum jelas apakah orang tersebut bisa terinfeksi Covid-19 atau tidak (CDC, 2020).

Untuk mendeteksi seseorang terkena Covid-19, langkah test laboratorium kesehatan dilakukan terhadap orang dengan gejala khusus diduga terjangkit Covid-19. Sebagaimana diterjemahkan dari publikasi WHO, tabel berikut memberikan informasi tes laboratorium untuk mendeteksi seseorang terjangkit virus Covid-19.

Di Kabupaten Tegal dari 84 kasus PDP, yang sudah sembuh sebanyak 59 orang, masih dirawat sebanyak 21 orang dan meninggal dunia sebanyak 4 orang. Dari 84 kasus PDP sebanyak 33 orang sembuh,belum dilakukan swab sebanyak 10 orang, yang sudah diswab menunggu hasil 32 orang dan yang sudah ada hasil swabnya 9 orang.

JUMLAH KASUS PDP BERDASARKAN HASIL SWAB PER TANGGAL 11 APRIL 2020

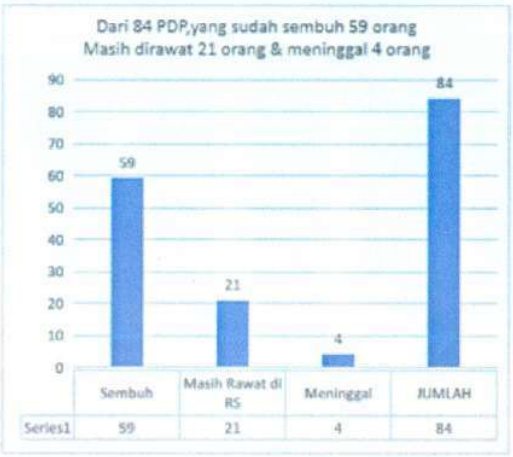

Dari 41 PDP yang sudah diswab, yang sudah keluar hasil ada 9 orang, yaitu positif 4 (45%) dan negatif 5 (55%),jadi yang lagi nunggu hasil swab 32 orang proporsi/peluangnya 45% positif (15 orang) dan 55% negatif (18 orang)

JUMLAH KASUS PDP BERDASARKAN HASIL SWAB PER TANGGAL 11 APRIL 2020

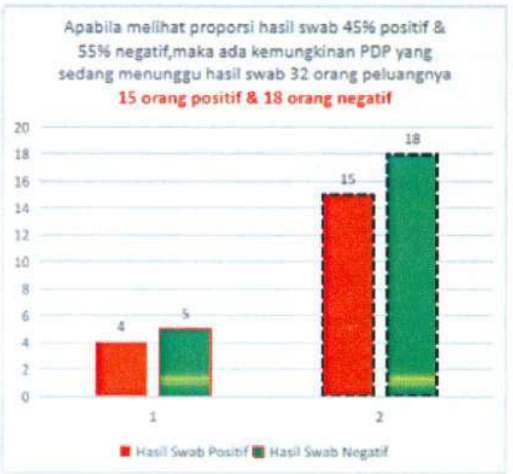

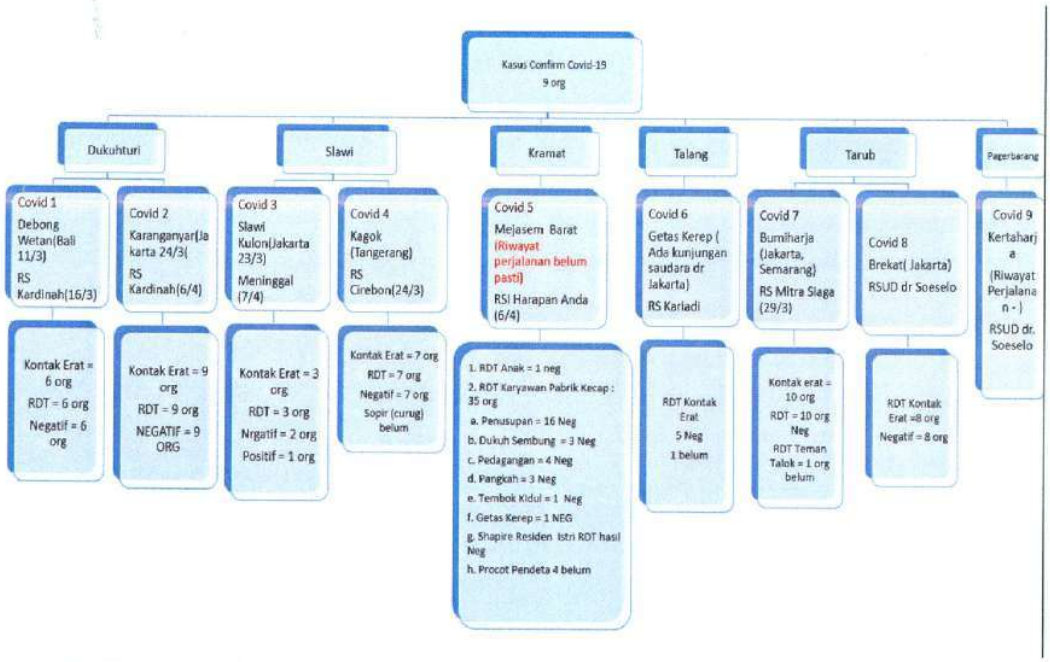

GAMBAR 1 : CLUSTER CONFIRM POSITIF COVID 19
DI KABUPATEN TEGAL

Dengan melihat besarnya proporsi dan banyaknya cluster positif covid bisa menggambar adanya fenomena gunung es,semakin besar proporsi dan banyaknya cluster semakin besar pula adanya fenomena gunung es positif covid 19 di Kabupaten Tegal. Sehingga perlu ada strategi dan kebijakan yang tepat dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Tegal

2. PEMBAHASAN

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien korona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan.

Dengan melihat trend kasus Covid 19 seperti pada grafik dibawah ini, maka Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Percepatan Penanganan Covid di Kabupaten Tegal yaitu dengan upaya penyembuhan pasien Covid 19 dengan tetap melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini telah melakukan langkah preventif yang terukur, jelas dan objektif seperti penerapan PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan & penyediaan tempat cuci tangan / hand sanitizer, kewajiban penggunaan masker, penyemprotan desinfektan, tetap di rumah dan larangan bepergian, social distancing, physical distancing dll.

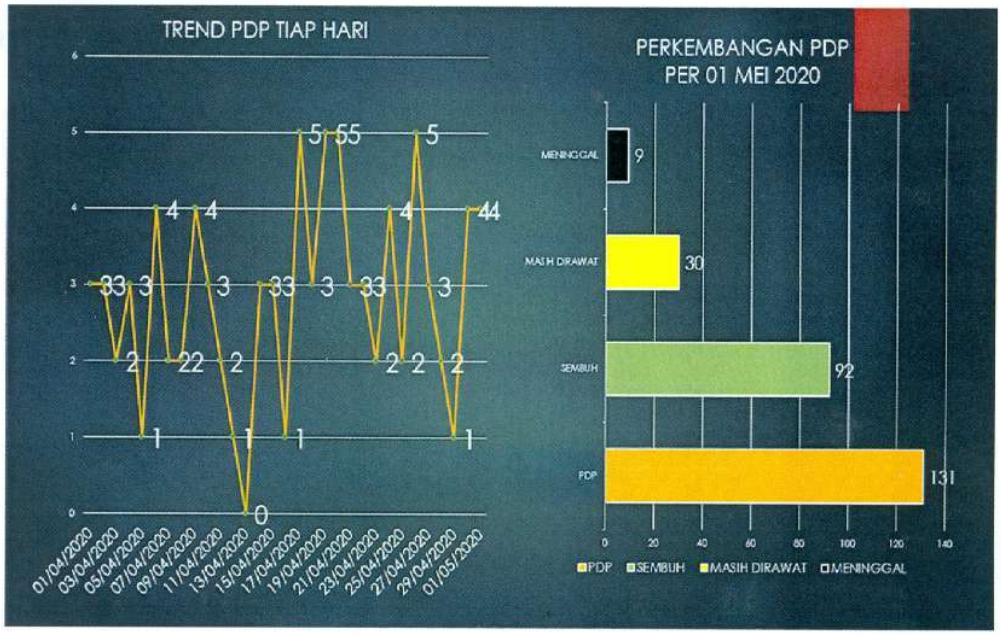

Konsentrasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam percepatan penanganan Covid 19 adalah dengan melaksanakan prinsip-prinsip :

a) Putuskan rantai infeksi/transmisi Covid 19 yaitu dengan cara cegah (prevent), skrinning (detect), tangani kasus dan determinan (response), social & physical distancing, protect health workers melalui kegiatan Penyemprotan desinfektan, penyedian hand sanitizer di tempat umum, pembagian masker dll dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19
b) Melakukan pengujian sampel yang masif terhadap pasien Covid 19 dengan melakukan kegiatan menyusun rencana aksi untuk 2 sd 3 bulan kedepan mulai Penyediaan APD, ALKES, BHP, obat-obatan dan keperluan kesehatan lainnya dalam rangka penyembuhan pasien Covid 19
c) Pelacakan yang agresif dengan kegiatan melakukan tracking/skrinning dan pengujian rapid test terhadap pelaku perjalanan (PP), orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pengawasan (ODP)
d) Melakukan isolasi dan karantina yang ketat dengan menyewa ruang isolasi rumah sakit swasta (RS Harapan Sehat dan RS Hawari Essa), penyediaan tempat karantina komunal di GOR Indoor Trisanja, Sewa hotel dll.
e) Melakukan analisa sebaran kasus Covid 19 di Kabupaten Tegal untuk mengetahui kewilayahan epidemiolgi Covid 19 dan kewilayahan wabah Covid 19.

3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sebagaimana pemaparan diatas, dapat direkomendasikan kebijakan dampak kesehatan terkait untuk Percepatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Tegal meliputi :

a) Putuskan rantai infeksi/transmisi Covid 19 yaitu dengan cara cegah (prevent), skrinning

(detect), tangani kasus dan determinan (response), social & physical distancing, protect health workers melalui kegiatan Penyemprotan desinfektan, penyedian hand sanitizer di tempat umum, pembagian masker dll dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19

b) Melakukan pengujian sampel yang masif terhadap pasien Covid 19 dengan melakukan kegiatan menyusun rencana aksi untuk 2 sd 3 bulan kedepan mulai Penyediaan APD, ALKES, BHP, obat-obatan dan keperluan kesehatan lainnya dalam rangka penyembuhan pasien Covid 19

c) Pelacakan yang agresif dengan kegiatan melakukan tracking/skrinning dan pengujian rapid test terhadap pelaku perjalanan (PP), orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pengawasan (ODP)

d) Melakukan isolasi dan karantina yang ketat dengan menyewa ruang isolasi rumah sakit swasta (RS Harapan Sehat dan RS Hawari Essa), penyediaan tempat karantina komunal di GOR Indoor Trisanja, Sewa hotel dll.

e) Melakukan analisa sebaran kasus Covid 19 di Kabupaten Tegal untuk mengetahui kewilayahan epidemiolgi Covid 19 dan kewilayahan wabah Covid 19.

4. KESIMPULAN

Sebagai bentuk Pemerintah hadir di masyarakat menghadapi pandemi Covid 19 maka Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan kebijakan-kebijakan dalam percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan beberapa kerangka kerja terukur, rasional dan objektif. Policy brief ini telah memaparkan landasan peran Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merespon Pandemi Covid-19 dan beberapa rekomendasi kebijakan dalam bidang Kesehatan.

Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan

Oleh: Febrie Hastiyanto, S.Sos, M.AP
Perencana Madya Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Pemerintah Kabupaten Tegal memberi perhatian terhadap upaya penanganan kemiskinan. Kabupaten Tegal bertekad untuk selalu menekan angka kemiskinan setiap tahun. Bila posisi Kabupaten Tegal saat ini 7,94% dari tahun sebelumnya 9,90% akan terus diupayakan agar angka ini terus turun di tahun-tahun yang akan datang. Terutama hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2024 nanti sebesar 5,50%.

Gambar 1.1. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan, posisi Kabupaten Tegal sebesar 1,27 poin pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,03 poin. Indeks kedalaman kemiskinan idealnya berada pada angka 0. Semakin tinggi angka indeks kedalaman kemiskinan, mengindikasikan semakin dalam/jauh rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan. Itu artinya, jumlah penduduk miskin berkurang, namun dari penduduk yang masih miskin kondisi kemiskinannya semakin buruk.

Gambar 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2018

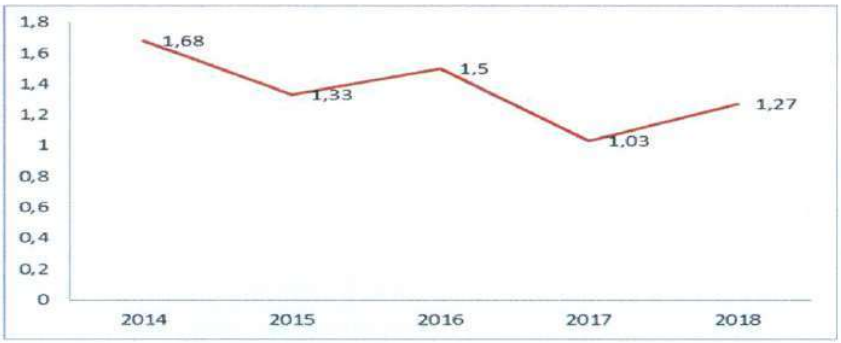

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019

Bila ditinjau dari indeks keparahan kemiskinan, yaitu kondisi relatif antara sesama warga miskin, angka eksistingnya juga semakin meningkat. Pada tahun 2018 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,44 poin meningkat dari angka 0.27 poin pada tahun 2017. Itu artinya, secara makro penduduk miskin berkurang, namun yang masih miskin kondisi kemiskinannya semakin buruk dan kondisi relatif dibanding sesama warga miskin semakin senjang.

Strategi Kolaborasi

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah barang tentu merupakan upaya kolaboratif antara semua pihak, tidak hanya di Kabupaten Tegal, tetapi kabupaten/kota tetangga, regional Jawa Tengah hingga nasional Indonesia.

Dibanding kabupaten tetangga eks Karesidenan Pekalongan yang karakteristiknya relatif sama dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, hingga kondisi makro ekonomi, angka kemiskinan Kabupaten Tegal paling rendah. Posisi Kabupaten Tegal sebesar 7,94 persen, sementara Brebes sebesar 17,17% dan Pemalang sebesar 16,04 persen. Untuk Kota Tegal angkanya sebesar 7,81%, sedikit di bawah Kabupaten Tegal. Meskipun dalam banyak referensi, kondisi antara wilayah kabupaten dan kota cenderung tidak dapat disandingkan karena karakteristiknya berbeda.

Gambar 1.3. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan

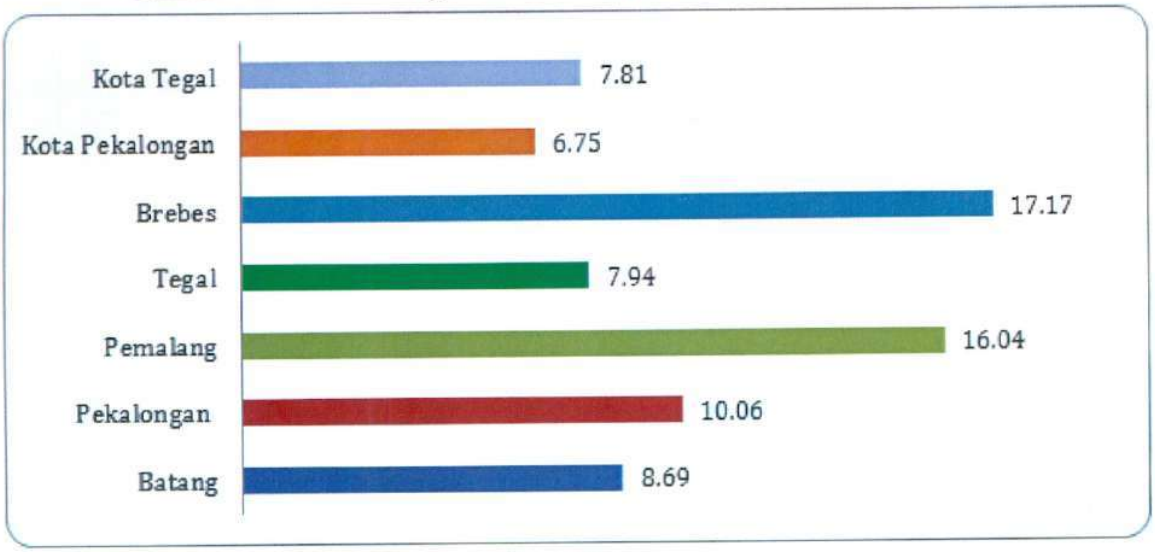

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019

Kondisi ini tentunya tidak membuat semua pihak terlena. Untuk itu diperlukan strategi kolaborasi untuk menyengkuyung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal. Pendekatan tata kelola pemerintahan kolaboratif atauncollaborative governance lahir pada saat masyarakat semakin berkembang dan pemerintah menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks, di sisi lain secara internal pemerintah memiliki beberapa keterbatasan yang pada akhirnyanmenuntut adanya pelibatan aktor-aktor non-pemerintahndalam upaya mencari solusi.

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini, berbagaiiketerbatasan kapasitas pemerintah dalam pelaksanaan suatunprogram atau kebijakan telah mendorongnpemerintah untuk melakukan kerjasama kolaboratif dengan berbagainpihak, baik dengan sesama lembaga pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun komunitasnmasyarakat.

Sinergi Aksi

Belum optimalnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinanndisebabkan antara lain karena belum sepenuhnya terbangun sinergitasnprogram dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa program terkait pengentasan kemiskinan masih sering tumpangntindih, baik kegiatan maupun target sasarannya. Sebaliknya, ada ketersumbatannprogram yang disebabkan karena tidak adanya atau kurangnyankoordinasi dan sinkronisasi perencanaan. Kondisi tersebut menunjukkannbelum optimalnya sinergitas program penanggulanganikemiskinan di antara stakeholders, serta masih tingginya ego sektoral pada masing-masing unit kelembagaan pemerintah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD).

Gambar 1.4 Fokus Rencana Aksi
Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019

Sejak tahun 2017 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tegal telah menginisiasi Rencana Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAB PKD) yang melibatkan unsur pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa untuk mengintervensi 4 isu pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu anak putus sekolah, RTLH, jamban dan pemberdayaan difabel. Meskipun hasilnya sedang dan terus dievaluasi, namun aksi bersama ini mengindikasikan langkah-langkah kolaborasi isu, pelaku, kelompok sasaran dan lokus yang sama antar pemangku kepentingan. Apresiasi misalnya diberikan Kementerian PAN dan RB RI yang mengganjar Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai salah satu Top 99 Inovasi Layanan Publik Nasional.

Indeks Pembangunan Desa

Pada tahun 2019 ini dan tahun-tahun yang akan datang yang akan datang, strategi penanggulangan kemiskinan akan diinisiasi melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan mengurangi pengeluaran masyarakat dan pendekatan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2019 ini pendekatan mengurangi pengeluaran masyarakat tetap melanjutkan RAB PKD yang sudah berjalan, di samping melaksanakan Program Yuh Sekolah Maning dan Program Three J, yaitu jaminan hidup (jadup), jaminan rumah (jarum) dan jaminan kesehatan (jakes).

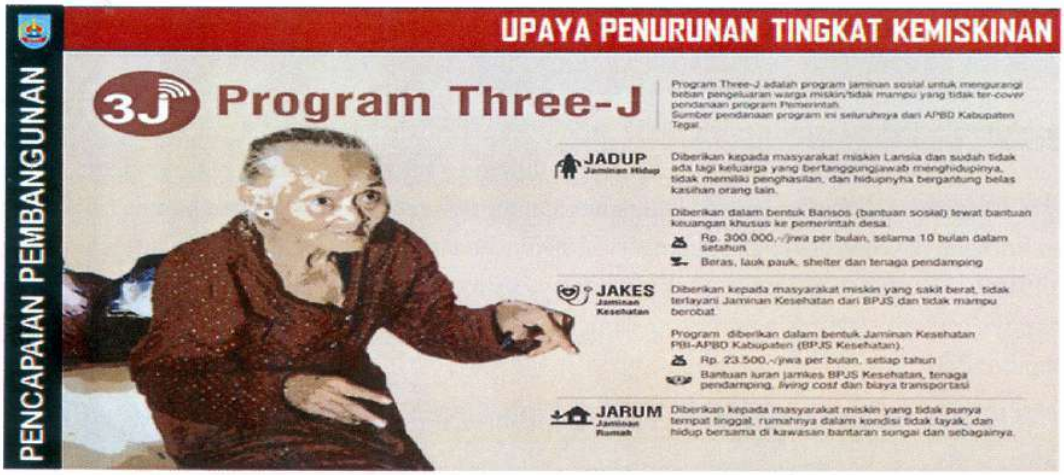

Gambar 1.5 Program Three J
Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019

Program *Three* J ini diinisiasi untuk kelompok sasaran warga miskin absolut adalah warga miskin yang hidup sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa penghasilan tetap serta tidak terdaftar dalam program penjaminan kesejahteraan pemerintah. Program penuntasan kemiskinan absolut merupakan program yang hendak meningkatkan derajat hidup masyarakat miskin absolut. Tujuan dari program ini hendak memastikan negara hadir dalam mengentaskan warga miskin absolut dari kondisi miskin sekaligus memutus ketergantungan fakir kepada warga lainnya

Pada tahun 2019 ini sedang diinisiasi program penumbuhan kewirausahaan pemuda pemula serta penuntasan kemiskinan absolut di masyarakat. Dari proses yang sedang berlangsung dapat dijaring tidak kurang 401 peserta dengan 1.000 lebih gagasan bisnis *start-up* wirausaha pemuda pemula. Dari 401 calon peserta, telah ditetapkan Top 100 calon peserta yang telah mendapatkan fasilitasi pendampingan dalam 20 tahapan dimulai dari pelatihan lingkungan usaha. Top 100 calon peserta ini akan mempresentasikan revisi gagasan bisnisnya sebagai *output* pelatihan lingkungan usaha untuk disaring lagi menjadi Top 50. Top 50 calon peserta wirausaha pemuda pemula Kabupaten Tegal akan diseleksi menjadi Top 28 yang akan memperoleh fasilitasi inkubasi bisnis dan dikawal hingga menjadi wirausaha muda mandiri yang legal.

Gambar 1.6 Program Tegal *Golet Boss* Muda
Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019

Pada tahun 2019 ini dan tahun-tahun selanjutnya akan diinisiasi strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pembangunan desa. Basis pembangunan desa yang dipilih adalah model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas.

IPD terdiri dari 5 Dimensi, 12 variabel dan 42 indikator yang hasil akhirnya berupa kategori desa mandiri, berkembang dan tertinggal. Posisi desa mandiri Kabupaten Tegal sebanyak 41 desa (14,59%) dibanding 281 desa se-Kabupaten Tegal.

Tabel 1.1.
Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Tegal

INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Mandiri 2014	Desa Mandiri 2018	Target Perubahan Status Desa Berkembang ke Mandiri	Jumlah Desa Mandiri 2024	
010	Margasari	13	1	2	2	4	31%
020	Bumijawa	18	0	1	1	2	11%
030	Bojong	17	2	2	0	2	12%
040	Balapulang	20	1	3	2	5	25%
050	Pagerbarang	13	0	0	5	5	38%
060	Lebaksiu	15	1	2	9	11	73%
070	Jatinegara	17	1	1	1	2	12%
080	Kedungbanteng	10	1	2	1	3	30%
090	Pangkah	23	2	3	8	11	48%
100	Slawi	5	2	4	1	5	100%
110	Dukuhwaru	10	0	3	3	6	60%
120	Adiwerna	21	2	5	4	9	43%
130	Dukuhturi	18	0	1	5	6	33%
140	Talang	19	0	2	1	3	16%
150	Tarub	20	1	1	5	6	30%
160	Kramat	19	2	5	6	11	58%
170	Suradadi	11	2	3	1	4	36%
180	Warureja	12	0	1	4	5	42%
3328	Kab. Tegal	281	18	41	59	100	36%

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019

5 Dimensi IPD tersebut adalah dimensi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kelima dimensi ini cukup strategis untuk menjadi panduan pembangunan pemerintah desa yang diasistensi dan difasilitasi pemerintah kecamatan.

Untuk itu, APBDesa tahun 2020 akan didorong untuk pelaksanaan pembangunan dan pencapaian IPD. Sementara Pemkab Tegal telah melakukan koordinasi dan telah disambut perangkat daerah kecamatan, bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 OPD kecamatan mendapat alokasi rata-rata Rp. 1 miliar, meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya. Rencana Kerja Anggaran (RKA) kecamatan telah didesain sedemikian rupa berupa pelaksanaan kegiatan koordinasi, asistensi dan pembinaan kepada desa dalam mewujudkan IPD sesuai target, yaitu 100 desa mandiri pada tahun 2024, atau 36% dari jumlah desa se-Kabupaten Tegal.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

Oleh : Leny Nur Rahayu Sad Astuti, S.Si
Statistisi Muda Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Tegal 68,24, meningkat 0,91 poin dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 67,33. IPM Kabupaten Tegal masih terkategori "sedang" ($60 \leq IPM \leq 70$).

Selama periode 2018 – 2019, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir di Kabupaten Tegal memiliki peluang hidup hingga 71,40 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2018. Anak-anak usia 7 tahun memilik peluang bersekolah selama 12,58 tahun atau meningkat 0,24 tahun. Penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,86 tahun (SMP Kelas 1), atau meningkat 0,16 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan dengan PPP (Purchasing Power Parity) atas dasar harga konstan 2012 telah mencapai 9.789 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat Rp 365 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Perkembangan IPM Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan disesuaikan dengan paritas daya beli (*PPP= Purchasing Power Parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan melalui standarisasi nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Karena IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang, maka memahaminya difokuskan pada dua aspek, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Grafik 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal dan Pertumbuhannya
Tahun 2011-2019

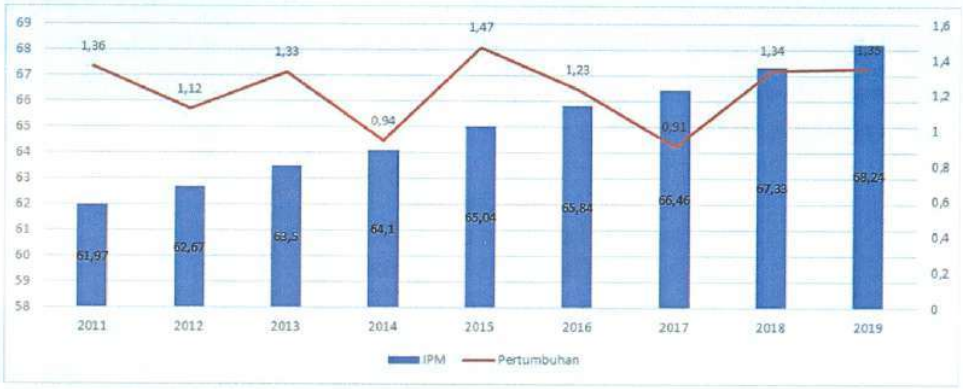

Sumber : BPS Kabupaten Tegal

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Tegal terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2019. IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 61,97 pada tahun 2011 menjadi 68,24 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Tegal rata-rata tumbuh 1,22 persen per tahun. Pada periode 2014 -2015, IPM Kabupaten Tegal tumbuh 1,47% atau 0,94 poin. Peningkatan pada periode tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 2015-2016, yang naik sebesar 0,8 poin atau 1,23 persen. Periode 2016-2017 terjadi kenaikan 0,62 poin atau sebesar 0,91 persen. IPM Kabupaten Tegal kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada periode 2017 – 2018 yaitu sebesar 0,87 poin atau sebesar 1,34 persen. Periode 2018 – 2019 mengalami pertumbuhan 1,35 persen atau naik 0,91 poin. Tahun 2019 IPM Kabupaten Tegal berstatus "sedang" (60 ≤IPM ≤70).

1. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia

Pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial tersebut diatas, maka peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan peningkatan indeks masing-masing komponen, maka IPM menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Kabupaten Tegal Menurut Komponen
Tahun 2011 – 2019

Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	70,46	70,59	70,73	70,80	70,90	71,02	71,14	71,28	71,40
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,9	11,16	11,63	11,99	12,00	12,01	12,06	12,34	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5,71	5,78	5,85	5,93	6,30	6,54	6,55	6,70	6,86
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	7.713	7.894	8.001	8.050	8.367	8.709	9.136	9.433	9.798
IPM		61,97	62,67	63,50	64,10	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
Selisih	**(poin)**	0,83	0,70	0,83	0,60	0,94	0,80	0,60	0,89	0,91
Pertumbuhan IPM	%	1,36	1,12	1,33	0,94	1,47	1,23	0,91	1,34	1,35

Sumber : BPS Kabupaten Tegal

A. Dimensi Umur Panjang dan HIdup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2019, Kabupaten Tegal telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,94 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar tahun. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 70,46 tahun, dan delapan tahun kemudian mencapai 70,40 tahun.

Grafik 2.
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten TEgal
Tahun 2011-2019 (tahun)

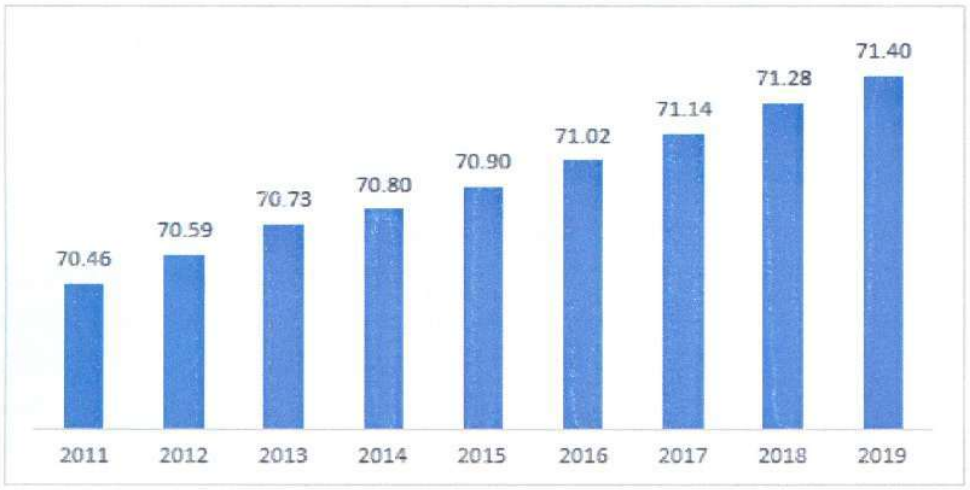

B. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indicator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia yang berusia 25 tahun keatas. Kedua indicator ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tegal telah meningkat sebesar 2,49 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,94 tahun.
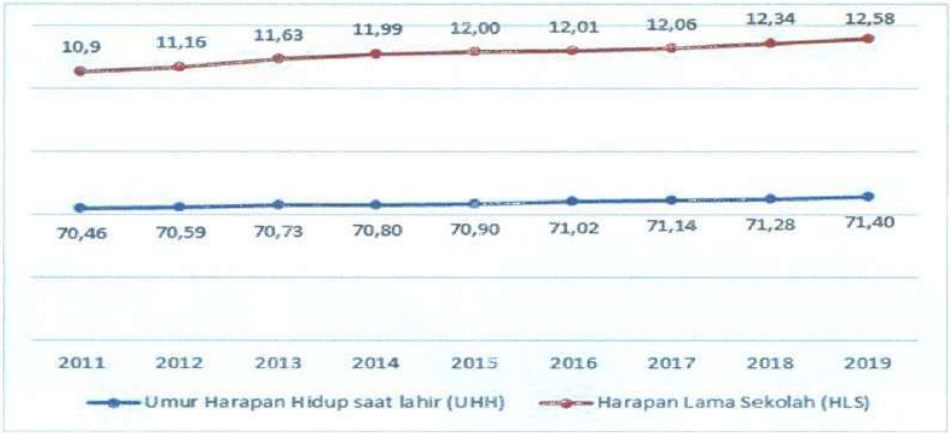
Grafik 3.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Di Kabupaten Tegal Tahun 2011-2019 (tahun)